

HUKUM WAKAF *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

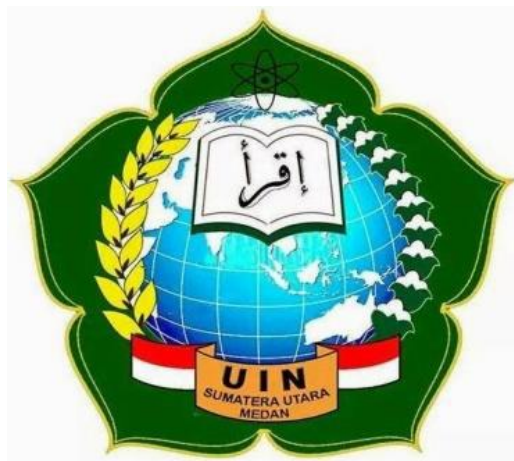
(Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)

SKRIPSI

Oleh:

TENGKU MUHAMMAD IQBAL

NIM: 24.15.3.075



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

1442 H / 2020 M

HUKUM WAKAF *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ - ZUHAILI

(Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)

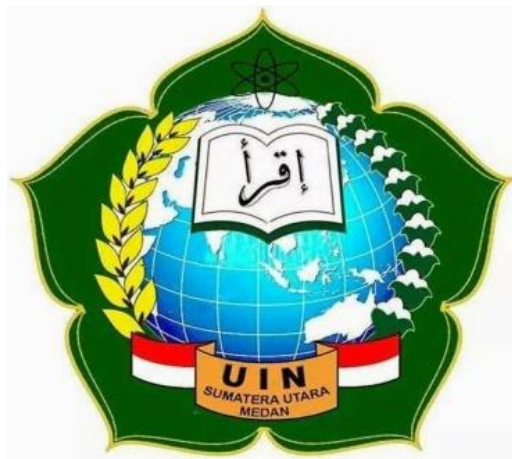
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S -1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH

TENGKU MUHAMMAD IQBAL

NIM. 24.15.3.075



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

1442 H / 2020 M

HUKUM WAKAF *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ - ZUHAILI

(Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)

SKRIPSI

Oleh:

Tengku Muhammad Iqbal

NIM: 24.15.3.075

Menyetujui:

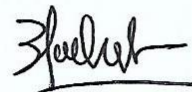
Pembimbing I



Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum

NIP. 19571230 198803 1 003

Pembimbing II



Dra. Sahliah, M.Ag

NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Muamalah,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN – SU, Medan



Fatimah Zahara, M.A

NIP. 19730208199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "HUKUM WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ – ZUHAILI (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 Desember 2020/ 03 Jumadil Awal 1442 H. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 18 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

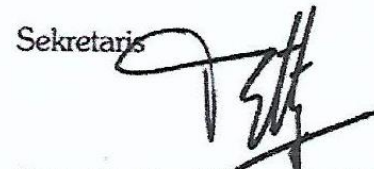
Ketua



Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208199903 2 001

Sekretaris



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn

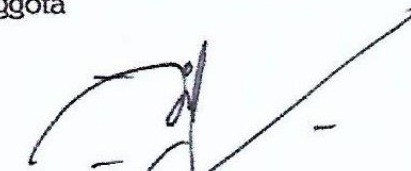
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag

NIP. 19591915 199703 2 001



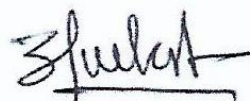
Annisa Satiwa, SH, M.Hum

NIP. 19770127 200710 2 002



Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum

NIP:19571230 198803 1 003



Dra. Sahliah, M.Ag

NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,



Dr. Ardiansyah, Lc, MA

NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tengku Muhammad Iqbal

Nim : 24.15.3.075

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Wakaf *Online* Dalam Perspektif Wahbah Az- Zuhaili
(Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, 20 September 2020

Yang membuat pernyataan,

TENGKU MUHAMMAD IQBAL

NIM: 24.15.3.075

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul HUKUM WAKAF *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ- ZUHAILI (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang telah mempengaruhi sistem dalam lembaga pengumpul wakaf yang terjadi pada masa sekarang ini. Wakaf sudah dilakukan sejak masa rasulullah, walaupun keberadaan wakaf tidak terdapat secara tegas di dalam Al-quran. Hanya dengan membuka internet dan menuju halaman lembaga pengumpul wakaf yang sudah berbasis *online*, masyarakat sudah dapat melakukan wakaf dengan tata cara yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep wakaf berbasis *online*, pelaksanaan wakaf *online* yang dilakukan lembaga Dompot Dhuafa, dan mengetahui hukum wakaf *online* dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian Perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari analisis peneliitian ini menyatakan bahwa melakukan wakaf secara *online* adalah tidak sah dikarenakan tidak terpenuhiya rukun dan syarat wakaf yang merupakan tolak ukur keabsahan dalam melakukan wakaf.

Kata Kunci : *Wakaf, Online*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas ke-hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. Karena atas nikmat, taufik dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa petunjuk serta jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul: **HUKUM WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ - ZUHAILI** (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik, hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi jurusan. Keberhasilan penulisan ini tak luput dari dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, **Prof. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak, **Dr. Ardiansyah, Lc, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN - SU, serta para wakil Dekan (Dekan I, II, Dan III). Begitu juga kepada Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan penelitian kepustakaan.
3. Bunda, **Fatimah Zahara, M.A** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tety Marlina, M.Hum** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada seluruh pegawai akademik yang membantu penulis dalam pengurusan administrasi dalam proses penyelesaian kuliah dan skripsi ini.
4. Ibu, **Dra. Laila Rohani, M.Hum** selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan selama perkuliahan. Serta seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya selama dalam proses perkuliahan.
5. Bapak, **Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum** selaku pembimbing I dan Ibu **Dra. Sahliah, M.Ag** selaku pembimbing II yang telah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu, memberikan koreksi, arahan, kritikan, dan saran serta membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terutama dan teristimewa, kepada kedua orang tua penulis **Tengku Muhammad Yusuf, S.P** dan **Ir. Nurhayati Siregar** yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan penulis. Terima kasih

Ntu, dan Mama jasa-jasamu tidak akan pernah bisa terhitung dan terbalas. Semoga dengan pencapaian ini penulis bisa meningkatkan bakti dan kasih sayang kepada kedua orang tua penulis. Dan semoga Tuhan memberikan ampunan dan lindungan-Nya. Selanjutnya kepada kakak Penulis **Tengku Khairunnisa, S.Ak** yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh teman dan sahabat penulis Amri Wahlul Bintang, Arifin Umar Razna Harahap, Dika Ananda Siregar, SH, Lulu Elvirayani, SH, Fajar Siddik, Aditya Maulana Dalimunthe, Nauval Adrikna, Habib Cahyadi, dan Hadid Habibi, S.AB yang turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini serta menjadi teman dikala susah maupun senang. Serta seluruh teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada abangda Arif Zuanda, SH dan Abdul Karim, Am.TEM yang telah menganggap penulis seperti adik sendiri serta memberikan bantuan dan saran-saran yang membangun dalam hidup maupun dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh senior, teman serta adik - adik di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepada keluarga besar Muamalah - B stambuk 2015 dan Keluarga besar KKN 03 Kampung Damai Binjai.
11. Kepada Dompot Dhuafa yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian.

12. Terakhir kepada pemilik Teras Cafe, Papa Kebab, dan Margolang Food and Drink beserta karyawan yang telah memfasilitasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Penulis sangat percaya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq.

Wassalamualaikum wr.wb.

Medan, 17 September 2020

Penulis

TENGKU MUHAMMAD IQBAL

NIM: 24.15.3.075

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Hipotesis.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Kajian Pustaka.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF.....	22
A. Pengertian Wakaf	22
B. Dasar Hukum Wakaf	27
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	32
D. Macam - Macam Wakaf.....	45

BAB III LEMBAGA PERWAKAFAN DOMPET DHUAFA DI INDONESIA... 49

A. Sejarah Lembaga Dompot Dhuafa	49
B. Visi, Misi dan Tujuan	53
C. Struktur Organisasi	55
D. Sekretariat Dompot Dhuafa Kota Medan	56
E. Lembaga Perwakafan Dompot Dhuafa di Kota Medan	56
F. Latar Belakang Wakaf <i>Online</i> Pada Dompot Dhuafa	60

BAB IV ANALISIS HUKUM WAKAF ONLINE PADA LEMBAGA DOMPET DHUAFA DITINJAU DARI PRESPEKTIF WAHBAH AZ – ZUHAILI.... 62

A. Konsep Wakaf <i>Online</i> Pada Lembaga Dompot Dhuafa.....	62
B. Mekanisme Dalam Melakukan Wakaf <i>Online</i>	63
C. Undang – Undang No.41 Tahun 2004 Terhadap Wakaf <i>Online</i>	67
D. Hukum Wakaf <i>Online</i> Ditinjau dari Perspektif Wahbah Az – Zuhaili	73
E. Analisa Penulis.....	83

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya. Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2013), h. 2.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْصُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)²

Ayat di atas sejatinya secara substansif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfaq dan melakukan amaliyah dan melakukan amaliyah yang bertujuan memberikan kebaikan bagi sesama.³

Kemudian ayat selanjutnya adalah :

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lantari Lestari & Islamic Book Service, 2010), h.39

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali ‘Imran (3: 92)⁴

Berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu *Beiruha*, sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Thalhah mengikuti nasihat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa kata infaq dalam ayat di atas menunjukkan arti sunah, namun umat islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infaq tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas diisyaratkannya wakaf.⁵

³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 31

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari & Islamic Book Service, 2010), h. 65

⁵ Abu Ubaid, *al-amwal*, (Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas Al – Azhar, 1991), h. 552

Hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah:

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال : اصاب عمر رضى الله عنه ارضا بخير فئاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فقال : ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها قال فتصدق بها عمر رضى الله عنه انه لا يباع اصلها ولا يرث ولا يوهب فتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان ياكل منها با المعرف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم

Artinya: "Dari Ibnu Umar Ra, ia berkata; Umar Ra. (ayahnya) Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, lalu Rasulullah SAW bersabda: "jika kamu kehendaki memilikinya (jangan kau jual), tahanlah induknya dan sedekahkan dia". Ibnu Umar berkata;" lalu Umar pun menyedekahkannya, tetapi ia tidak menjual induknya tidak mewariskannya, tidak pula menghibahkannya, bahkan ia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir disana, dan kepada kerabat, para hamba sahaya, kepada para sabilillah, Ibnu sabil dan para tetamu. Tidak berdosa orang yang mengurusnya makan hasilnya dengan penuh kebaikan, dan ia member makan kawannya dengan tidak menarik uang sedikitpun". (Hadits disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim).⁶

Hadits tersebut menggambarkan bahwa sahabat Umar bin Khatab telah melaksanakan perintah Nabi saw untuk menahan dan menyerahkan harta

⁶ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Bulughul Marom*", terj. Drs. Moh. Macfuddin Aladip (Semarang ; Toha Putra, 2012), h. 466

tersebut dengan prinsip wakaf, yaitu tidak menjual, tidak mewariskan serta tidak dihibahkan. Adapun yang disedekahkan hanyalah manfaat yang dapat diambil atau dihasilkan oleh harta tersebut.

Perkembangan zaman saat ini banyak merubah gaya perilaku manusia dalam bidang muamalah. Hal tersebut memaksa setiap kegiatan *muamalah* tersebut harus mengikuti zaman, namun tanpa melanggar dari norma-norma hukum negara maupun hukum islam. Era saat ini sangat memungkinkan seluruh kegiatan muamalah dapat dilakukan dengan cara instan dan berbasis teknologi yang bersifat transparan. Konsep serba instan dan berbasis teknologi tersebut melahirkan gaya baru dalam melakukan kegiatan muamalah. Hal tersebut juga berlaku pada perwakafan di Indonesia yang kita kenal dengan wakaf *online*.

Di dalam perwakafan *online*, kegiatan wakafnya dapat menggunakan ATM, aplikasi android, dan *website* untuk menjaring dana umat. Di dalam wakaf *online* ini tidak ada pertemuan antara pewakaf dan penerima wakaf, seseorang yang ingin melakukan kegiatan wakaf *online* dapat melihat informasi wakaf yang akan dipilih, yang jenis atau bentuk perwakafannya telah

disediakan oleh lembaga penerima wakaf tersebut dalam bentuk informasi di situs *website* resminya.

Salah satunya adalah lembaga pengumpul wakaf Dompot Dhuafa. Dalam pengumpulan dana wakaf, mereka menggunakan basis wakaf *online*. Setelah jenis wakaf dipilih melalui *website* maka para *pewakif* dapat memasukkan besaran jumlah yang akan di wakafkannya tanpa adanya batasan nominal. Setelah memilih maka para *pewakif* akan diberikan bukti berupa struk pembayaran.

Secara garis besar, dalam berwakaf di Dompot Dhuafa terbagi dalam 5 (lima) program wakaf yaitu:

1. Program kesehatan, didalam program kesehatan Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik.
2. Program pendidikan, didalam program pendidikan Dompot Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pembangunan sekolah dan universitas, serta beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu.

3. Program ekonomi, untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya *entrepreneur* dan lapangan kerja baru.
4. Program pengembangan sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah, pembangunan mesjid dan lain sebagainya.⁷

Pada dasarnya cara mengeluarkan wakaf secara *online* (wakaf *online*) ini memang memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana mestinya. Tetapi, dengan tidak bertemunya kedua belah pihak dapat memunculkan pertanyaan baru, apakah orang yang mewakafkan hartanya tersebut sudah cakap hukum atau belum serta proses ikrar wakaf menjadi tidak jelas hukumnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah diatur mengenai syarat dan rukun *wakif* dan nazhir. Bagaimana kita mengetahui bahwa kedua belah pihak tersebut sudah cakap hukum atau belum. Selanjutnya hal yang diatur oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun

⁷ Diambil dari: <https://donasi.tabungwakaf.com/campaign/>, di akses tanggal 8 Februari 2020, Jam 20.37

2004 tentang wakaf, transaksi wakaf diharuskan pihak *wakif* melaksanakan ikrar wakaf kepada nazhir dan menyebutkan sasaran atau peruntukan wakaf yang dilaksanakan di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan di saksikan oleh 2 orang saksi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf.⁸

Sementara itu wakaf *online* tidak memenuhi unsur demikian, terlebih lagi adanya hal-hal tentang rukun dan syarat wakaf yang dilanggar oleh wakaf *online* sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya sebagai berikut :

وقال الجمهور: للوقف أربعة: هي الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. باعتبار أن

الركن: ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءاً منه أم لا.

Artinya: Mayoritas ulama mengatakan bahwa: wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shigat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang

⁸ Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.⁹

المبحث الأول-شروط الواقف:

يشرط في الواقف لصحة الوقف ونف ونفاذه ما يأتي:

١- أن يكون الواقف حراً مالكاً

٢- أن يكون عاقلاً

٣- أن يكون بالغاً

٤- أن يكون رشيداً¹⁰

Artinya: Demi keabsahan wakaf dan keberlangsungannya. Disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaklah Pewakaf adalah orang yang merdeka dan pemilik barang tersebut.
2. Hendaklah si pewakaf orang yang berakal
3. Hendaklah si pewakaf orang yang baligh.
4. Hendaklah si pewakaf orang dewasa.

⁹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 275

¹⁰ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 176

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf secara *online*. Penulis ingin mengetahui tentang hukum dari pelaksanaan wakaf secara *online* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian yang diperoleh, hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **HUKUM WAKAF *ONLINE* DALAM PRESPEKTIF WAHBAH AZ - ZUHAILI (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep wakaf *online* pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa kota Medan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan wakaf *online* yang di selenggarakan Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa kota Medan ?
3. Bagaimanakah hukum wakaf *online* ditinjau dari perspektif Wahbah Az – Zuhaili ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar wakaf yang berbasis *online*.
2. Informasi yang disajikan berfokus kepada lembaga Dompot Dhuafa yang beralamatkan di, Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No.17 Sei Kambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep wakaf *online* pada Lembaga Dompot Dhuafa di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan wakaf *online* yang dilakukan oleh Lembaga Dompot Dhuafa di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hukum wakaf *online* ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah *muamalah* yang khususnya membahas tentang pelaksanaan wakaf *online*.
2. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai rujukan referensi.
3. Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi tentang hukum wakaf *online* dan melaksanakan kegiatan dengan secara benar. Serta untuk menambah wawasan mengenai status hukum baik secara agama maupun secara negara dan pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat yang ingin melakukan wakaf secara *online*.

F. Kerangka Teoritis

Menurut Wahbah Az – Zuhaili kata الوقف dan التحبيس (menahan) serta التسبيل (menderma) adalah satu arti. Wakaf menurut bahasa adalah menahan

tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan harta).¹¹ Sedangkan dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain dari pada itu wakaf mempunyai tujuan dan fungsi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 tujuan wakaf adalah sebagai berikut: wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 dan PP No. 28 / 1977 pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

¹¹ Atep Hendang Waluya, *Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer*, Jurnal, (Jakarta : Misykat Al Anwar, 2018) h. 51

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada latar belakang bahwa wakaf *online*, khususnya pada Dompot Dhuafa sudah memiliki fungsi dan tujuan yang jelas melalui program yang di tawarkan kepada calon *wakif* akan tetapi, kegiatan wakaf dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat, rukun, dan ketentuan yang telah di tetapkan. Sebagaimana di jelaskan Wahbah az – Zuhaili dalam bukunya:

وقال الجمهور: للوقف أربعة أركان: هي الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. باعتبار أن

الركن: ما لا يتم الشيء إلا به، سواء كان جزءاً منه أم لا.

Artinya: “Mayoritas ulama mengatakan bahwa: wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shigat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.”

Selain dari pada itu dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 17 ayat 1 berisi tentang: Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Perkembangan wakaf berbasis *online* memunculkan persoalan hukum baru dalam mekanisme melakukan wakaf. Pengawasan, pengelolaan, serta tidak bertemunya pihak pengelola wakaf dan pewakaf berbasis *online* adalah

hal baru dalam metode berwakaf, selanjutnya permasalahan tidak adanya saksi dan tidak adanya ikrar wakaf adalah hal yang bertentangan dengan syara' dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa melakukan kegiatan wakaf secara *online* belum memenuhi ketentuan yang ada dalam syari'at islam maupun secara hukum di indonesia. Dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun wakaf, sehingga yang dipraktekkan oleh Dompot Dhuafa hukumnya adalah tidak sah. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang didapat dari penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris atau *Field Research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.¹² Yaitu untuk menemukan fakta-fakta di

¹² Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni Lembaga Dompot Dhuafa. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *perskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹³ Yang dipadukan dengan metode penelitian pustaka (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif meliputi pendekatan perundang-undang (*statute approach*), adapun pendekatan yang dijadikan penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang akan diteliti dan dipadukan dengan pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas Al- Qur'an dan Al-Hadits.¹⁴ Yang bertujuan untuk menggali ketentuan hukum wakaf pada Lembaga Dompot Dhuafa Kota Medan.

¹³Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986), h. 10.

¹⁴Syamsul Anwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 22.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Dompot Dhuafa wilayah Kota Medan. Yang beralamatkan di, Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No.17 Sei Kambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini. Kemudian langsung dianalisis dengan pendapat dari Wahbah Az – Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan hukum wakaf *online*. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bertujuan untuk menunjang hasil penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana wawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.¹⁵ Wawancara sama halnya dengan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di Lembaga Dompot Dhuafa Kota Medan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, dan sumber lain serta dokumentasi penyusun yang mendukung data sekunder yang saling berkaitan.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Metode Penelitian

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT INDEKS, 2012), h. 44.

¹⁶ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019.

7. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hukum wakaf online pada lembaga pengumpul wakaf Dompot Dhuafa, kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut kitab Wahbah Az – Zuhaili.

I. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu, tidak didapat secara signifikan karya ilmiah, skripsi, atau buku-buku dari beberapa disiplin ilmu yang membahas khusus tentang hukum wakaf secara *online*, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang menyinggung dengan tema yang peneliti bahas. Dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang menyinggung tentang tema yang peneliti bahas dalam skripsi ini. Berikut beberapa

penelusuran yang substansinya berkaitan dengan topik yang penyusun lakukan diantaranya:

Skripsi Iqbal Harfi Munthe, NIM 28133046, Mahasiswa UIN Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan wakaf pada Global Wakaf Cabang Medan kurang efisien.

Skripsi Nurcahyati, NPM 1412011322, Mahasiswi Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompot Dhuafa Republika”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat dengan dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku melalui metode analisis.

Skripsi oleh Khanif Muhafid, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2014 yang berjudul “Studi kritis terhadap pemikiran As-Syayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang keabsahan wakaf uang dalam perspektif As-Syayyid Sabiq dan Regulasi di Indonesia

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima)

bab yang tersusun atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Teoritis, hipotesis, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan pembahasan tentang pengertian umum konsep wakaf terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf.

Bab III Pelaksanaan wakaf *online* di Lembaga Dompot Dhuafa Dalam bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh dari lapangan, membahas tentang sejarah Dompot Dhuafa, sistem pengumpulan wakaf, dan Latar belakang terealisasinya wakaf *online* pada lembaga Dompot Dhuafa Kota Medan.

Bab IV Merupakan temuan dan pembahasan yang terdiri dari konsep wakaf *online* pada Dompot Dhuafa, mekanisme pelaksanaan wakaf *online* pada lembaga Dompot Dhuafa, wakaf *online* ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili serta analisa penulis.

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *Waqafa -Yaqifu -Waqfan* (وقف-يقف-وقفنا) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *Waqafa -Yuqifu -Waqfan* (وقف-يقف-وقفنا) sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan* (حبس-يحبس-تحبس). Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna:

الوقف بمعنى التحسيس التسييل

Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.”¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wakaf diartikan dengan sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau yang berhubungan dengan agama.¹⁸ Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan

¹⁷ Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur al-Mishri. *Lisan al-‘Arab*. (Bulaq: Al-Mishriyah, 1301 H), Jilid 11, h. 276; Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2008), h. 151

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1006.

penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹⁹ Secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai wakaf. Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan hukum yang ditimbulkan.²⁰ Perbedaan tersebut diantaranya:

1. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.²¹ Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat.”²²

¹⁹ Abu Zahrah. *Muhadharat fi al-Waqf*. (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi 1971), h. 41.

²⁰ Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016) h. 89.

²¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 269.

²² Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 2.

2. Menurut Mazhab Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Jumhur Ulama

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Jumhur Ulama berpendapat wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan.²³

3. Menurut Mazhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat-nya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.²⁴

²³ Depag, *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 3.

²⁴ M. Sudirman, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional*, Jurnal (ParePare: STAIN ParePare, 2010) h. 144.

4. Menurut Muhammad Jawad Mughniah

Menurut Muhammad Jawad Mughniah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan *tahbis al-asli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya ialah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.”²⁵

5. Menurut Imam Muhammad dan Abu Yusuf

Wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya pada seseorang (lembaga) yang disukai dan hukumnya menjadi milik Allah.²⁶

6. Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid sabiq dalam bukunya mendefinisikan bahwa wakaf adalah:

حبس الاصل وتسبيل الثمرة اى حبس المال وصرف منافعه فى سبيل الله

²⁵ Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 635.

²⁶ Mukhlisin Mazarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Moderen Darussalam Gontor*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010) h. 78.

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.”²⁷

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqih istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau Nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik yang menyerahkan melainkan ia menjadi hak Allah (hak umum).²⁸ Sedangkan pengertian wakaf dalam regulasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 3*, (Beirut: Darul Kutub, t.th.), h. 378.

²⁸ Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, (Djambatan, Jakarta, 1992), h. 981.

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.²⁹

2. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) jo. PP No. 42 Tahun 2006 :

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁰

B. Dasar Hukum Wakaf

a. Al Qur'an

Adapun mengenai wakaf secara khusus tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dengan perkataan lain, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al- Qur'an, tetapi keberadaannya diilhami oleh Ayat-ayat Al-Quran tertentu.³¹ Diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2013), h. 31.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, h. 2.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-baqarah (2):261)³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٦٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)³³

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 7

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari & Islamic Book Service, 2010), h.77

Ayat di atas sejatinya secara substansif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfaq dan melakukan amaliyah dan melakukan amaliyah yang bertujuan memberikan kebaikan bagi sesama³⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali - kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali ‘Imran (3: 92)³⁵

Berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha.³⁶

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari & Islamic Book Service, 2010), h. 39

³⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 31

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari & Islamic Book Service, 2010), h. 65

³⁶ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, h. 209. Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'Ala At-Tahrir*, (Kairo : Isa Al-halabi), II h. 173

b. Hadis

Disamping ayat-ayat Al-Quran, pemahaman dalam konteks ajaran wakaf juga diambil dari beberapa hadis nabi yang menyinggung masalah sedekah jariyah.³⁷ Diantaranya sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال : اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخير فتاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فقال : ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه انه لا يباع اصلها ولا يرث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان ياكل منها با المعرف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم

Artinya: "Dari Ibnu Umar Ra, ia berkata; Umar Ra. (ayahnya) Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, lalu Rasulullah SAW bersabda: "jika kamu kehendaki memilikinya (jangan kau jual), tahanlah induknya dan sedekahkan dia". Ibnu Umar berkata;" lalu Umar pun menyedekahkannya, tetapi ia tidak menjual induknya tidak mewariskannya, tidak pula menghibahkannya, bahkan ia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir disana, dan kepada kerabat, para hamba sahaya , kepada para sabilillah, Ibnu

³⁷ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) h. 24

sabil dan para tetamu. Tidak berdosa orang yang mengurusnya makan hasilnya dengan penuh kebaikan, dan ia member makan kawannya dengan tidak menarik uang sedikitpun”. (hadits disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim).³⁸

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قل: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من

صدقة جارية، أو ولد صالح يدعوه. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.” (HR. Muslim).³⁹

c. Peraturan wakaf di Indonesia

Di Indonesia sendiri wakaf sudah diatur dalam Perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

³⁸ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, terj. Drs. Moh. Macfuddin Aladip (Semarang ; Toha Putra, 2012), h. 466

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth), h. 1255

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
5. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
8. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁴⁰

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.⁴¹ Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi wakaf namun di perlukan adanya rukun

⁴⁰ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57

⁴¹ Muhammad Daud Al-i. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI-Press, 1988), h, 84.

dan syarat wakaf dalam pelaksanaannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang di wakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shigat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu perkara yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.⁴²

Menurut Wahbah Az - zuhaili untuk keabsahan wakaf, diperlukan syarat-syarat untuk pewakaf, barang yang diwakafkan, pihak yang mendapatkan wakaf, dan *shigat* wakaf. Di Indonesia sendiri rukun dan syarat wakaf sudah di atur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 yang Berisi: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. *Wakif*
- b. *Nazhir*
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

⁴² Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 276.

Untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)

Menurut al-Nawawī, syarat *wakif* itu ada dua yaitu hendaklah sah ibaratnya (perkataannya), dan hendaklah mempunyai kecakapan memberikan *tobaru'* (sumbangan).⁴³ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili *wakif* meliputi empat syarat yaitu:

- a. Hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang tersebut
- b. Hendaklah si pewakaf orang yang berakal
- c. Hendaklah si pewakaf orang yang baligh
- d. Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa⁴⁴

Dalam pasal 215 ayat (2) KHI jo. Pasal 1 (2) PP No. 28 tahun 1977 dijelaskan bahwa “*Wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta miliknya.” Syarat-syaratnya adalah:

⁴³ Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *Rauḍah al-Taḥbīn*, (Bairut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, t.th.), Jilid IV, h, 377.

⁴⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 289.

- a. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (pasal 217 KHI jo. Pasal 3 PP no. 28/1977).⁴⁵

2. *Nazhir* (pengelola wakaf)

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Menurut UU No 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang syarat untuk *nazhir* perorangan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia

⁴⁵ Said Aqil Husain al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 136.

b. Beragama Islam

c. Dewasa

d. Amanah

e. Mampu secara jasmani dan rohani

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Untuk *nazhir* organisasi syartanya adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nazhir* perorangan.
- b. Organisasi bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan islam.

Sedangkan syarat untuk nazir badan hukum adalah:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam⁴⁶

Untuk menjadi seorang *nazhir*, haruslah dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat moral, yaitu *pertama*, paham tentang hukum wakaf dan zis (zakat, infaq, sedekah), baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara RI, *kedua*: jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan kepada sasaran wakaf.
 - b. Syarat manajemen, yaitu: *pertama*, mempunyai kapabilitas yang baik dan leadership, *kedua*: mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdayaan.
 - c. Syarat bisnis, yaitu: *pertama*: mempunyai keinginan, *kedua*: mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan, *ketiga*: mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagai layaknya *entrepreneurship*.⁴⁷
3. Harta Benda Wakaf (*mauquf*)

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat dalam

⁴⁶ Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Diktorat Jendral Bimbingan Masyartakat Islam), 2005, h. 49.

jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*.⁴⁸ Terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai syarat *Mauquf* (benda yang akan diwakafkan) diantaranya adalah:

A. Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu:

- 1). Harus bernilai harta menurut shara' dan merupakan benda yang tidak bergerak
- 2). Tertentu dan jelas
- 3). Milik sah *wakif* ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain.

B. Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan *Mauquf*,

- 1). Milik sendiri dan tidak terkait dengan orang lain
- 2). Harta tertentu dan jelas
- 3). Dapat dimanfaatkan oleh sebab itu harta yang sedang menjadi jaminan hutang dan harta yang sedang disewa orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki membolehkan untuk mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.⁴⁹

⁴⁸Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V, h, 1006.

C. Ulama mazhab Shafi'i dan Hambali mensyaratkan *Mauquf*,

- 1). Sesuatu yang jelas dan tertentu
- 2). Milik sempurna *wakif* dan tidak terkait dengan hak orang lain
- 3). Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
- 4). Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu. Di samping itu baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.⁵⁰

4. Ikrar Wakaf (*Shigat*)

Shigat atau ikrar wakaf bisa dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Shigat hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari akad dari seseorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung pada proses perpindahannya kepada orang yang menerima wakaf melalui ucapan *qabul*.⁵¹

Secara umum syarat sah *shighat* adalah:

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* Cet. V, Jilid V, h. 1906.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf Dan Peraturan Pemerintahan Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjend Bimas Islam Depag, 2007) h. 46.

- a. Harus terjadi seketika/selesai.
- b. Tidak diikuti syarat palsu
- c. Tidak diikuti syarat pembatasan waktu. Pendapat ini diungkapkan oleh hampir semua Imam Mazhab kecuali Imam Malik.
- d. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁵²

Selain itu menurut Undang - undang perwakafan terdapat tambahan persyaratan yaitu, ketika hendak mewakafkan harta benda, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus benda wakaf (*nazhir*). Ikrar dapat dilakukan dengan secara lisan maupun tulisan perwakafan dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan *nazhir*, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu.

⁵² Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 59.

Dalam pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:⁵³

- a. Nama dan identitas *wakif*
 - b. Nama dan identitas nadhir
 - c. Nama dan keterangan harta benda wakaf
 - d. Peruntukan harta benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) merupakan wewenang *waqif*. Baik harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*Wakaf Ahli*), atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*Wakaf Khairi*). Syarat dan

⁵³Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, h. 9

tujuan wakaf adalah untuk kebaikan dan Mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya⁵⁴

Namun terdapat perbedaan antara para fiqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut keyakinan *waqif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *waqif*.

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar Mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *waqif*. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu :

- 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
- 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, (Semarang :Pustaka Pelajar, 2004), h. 323

tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan *waqif*. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar islam dan badan-badan sosial umum. dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari'at-syari'at Islam.

c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi'i (*Syafi'iyyah*) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jama'ah tertentu) dan tidak tertentu.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Al-Khathib, *al Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006), h. 47

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan yang diperbolehkan syari'at Islam. Pada dasarnya, wakaf merupakan amal mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu, *maukuf 'alaih* haruslah di jalan kebaikan.⁵⁶

6. Jangka Waktu Wakaf

Jangka waktu wakaf yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yakni *waqif* diperbolehkan membatasi waktu wakafnya. Artinya, *waqif* hanya mewakafkan manfaat dari benda yang diwakafkan dan setelah jangka waktu tersebut habis, *waqif* diperbolehkan meminta kembali benda yang diwakafkannya. keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong terutama untuk kemaslahatan ummat, diantaranya adalah kegemaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya. Dalam hal ini para perumus Undang-Undang ini berharap bahwa kebiasaan ini dapat diatur dalam Undang-Undang dan dipermudah prosesnya sehingga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini terdapat berbagai perkembangan fiqh wakaf meliputi kebolehan wakaf uang, kebolehan wakaf sementara waktu, kebolehan pengalihan fungsi wakaf dan lain sebagainya.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf Dan Peraturan Pemerintahan Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjend Bimas Islam Depag, 2007) h. 46

Penetapan pengertian wakaf yang menyebutkan kebolehan mewakafkan sesuatu dalam jangka tertentu berdasarkan pada pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum Islam terhadap penggabungan berbagai macam mazhab fiqh dalam konsep fiqh Indonesia yang di kristalkan dalam bentuk undang-undang di negara indonesia, tanpa mengkhususkan pada mazhab tertentu sehingga secara keseluruhan dapat dipergunakan oleh seluruh umat Islam Indonesia yang multi mazhab, sehingga kesemua mazhab terakomodir dalam undang-undang tersebut walaupun tidak dalam satu permasalahan.⁵⁷

D. Macam - macam wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Wakaf Ahli (*dzurri*)

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Dalam pengertian lain wakaf dzurri adalah wakaf yang di khususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara, atau ibu bapaknya.⁵⁸

⁵⁷ Nurul Hukmiah, dkk, *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana: Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)*, (Aceh: UNSYIAH, 2015) h. 59

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

...قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَأَنَا أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya : “.... aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”⁵⁹

Dalam satu segi, wakaf ahli (*zurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf.⁶⁰

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering

⁵⁸ Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005) cet.I, h. 25.

⁵⁹ Muhammad Ali As Shaabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut : Daar al Fikr) jilid I, h. 299.

⁶⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.14.

menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.⁶¹

2. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.⁶²

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 17.

⁶² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988) h. 90.

Dengan demikian, benda wakaf benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum),⁶³ tidak hanya untuk keluarga atau kerabat terbatas. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si *wakif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum.⁶⁴

⁶³ Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 17.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) h. 397.

BAB III

LEMBAGA PERWAKAFAN DOMPET DHUAFA DI INDONESIA

A. Sejarah Lembaga Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Pada april 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham Harian Republika.

Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, alm. Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama, serta awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *entertainment*.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, alm. Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, dai, sekaligus aktivis sosial. Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per-bulan, dijawab, “Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan.” Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi, “Dari mana sumber dana itu?” Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata. Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka. Seperti tercekik, Parni Hadi menukas, “Saya

malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman.” Zainuddin MZ segera menambahkan, “Saya akan bantu carikan dana.” Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp 6.000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil! Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya.

Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.⁶⁵

⁶⁵ Diambil dari: <https://ddwaspada.org/sejarah/> tanggal 19 Juli 2020, pukul 22.30 WIB.

B. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan

b. Misi

- Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis
- Mendorong Sinergi dan Penguatan Jaringan Kemanusiaan & Pemberdayaan Masyarakat Dunia
- Mengokohkan Peran Pelayanan, Pembelaan & Pemberdayaan
- Meningkatkan Kemandirian, Independensi & Akuntabilitas Lembaga dalam Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat Dunia
- Mentransformasikan Nilai-Nilai untuk Mewujudkan Masyarakat Religius

c. Tujuan

- Terwujudnya Organisasi Dompot Dhuafa dengan standar Organisasi Global
- Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat

- Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia
- Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel
- Membangun sinergi dan jaringan global
- Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat
- Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
- Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
- Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat
- Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan
- Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
- Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi

- Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga
- Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme
- Membangun komunitas berbasis masjid
- Melahirkan kader dakwah
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari⁶⁶

C. Struktur organisasi

Sebagai salah satu lembaga perwakafan di Indonesia Dompot Dhuafa mempunyai struktur organisasi kepengurusan pusat yang diantaranya adalah:

Ketua Dewan Pembina	: Parni Hadi
Ketua Dewan Pengawas	: Rahmad Riyadi
Ketua Dewan Syariah	: M. Amin Suma
Ketua Dewan Pengurus	: Nasyith Majidi
Direktur Eksekutif	: Imam Rulyawan

⁶⁶ Diambil dari: <https://www.dompetdhuafa.org/id/tentangkami> tanggal 19 Juli 2020, pukul 22.30 WIB.

D. Sekretariat Dompot Dhuafa Kota Medan

Dompot Dhuafa berlokasi di Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No.17 Sei Kambing C, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan

E. Lembaga Perwakafan Dompot Dhuafa di Kota Medan

1. Sejarah Dompot Dhuafa kota Medan

Awal berdirinya Dompot Dhuafa di kota Medan adalah sebagai lembaga zakat daerah dengan nama Peduli Umat Waspada yang merupakan kerjasama antara Dompot Dhuafa dan Waspada yang berkantor di gedung Harian Waspada kota Medan, namun setelah keluarnya Undang – undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat yang salah satunya berisi “bahwa lembaga amil zakat harus menginduk kepada lembaga amil zakat nasional” maka Peduli Umat Waspada yang merupakan jaringan Dompot Dhuafa merubah namanya dan mengindependenkan diri menjadi Dompot Dhuafa Waspada.⁶⁷

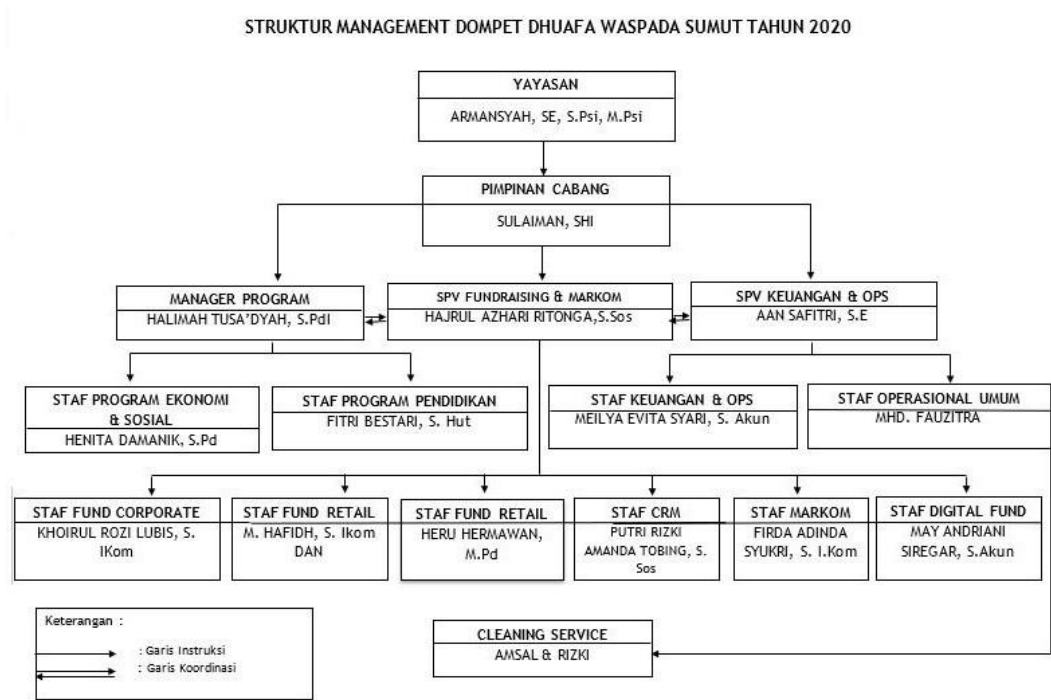
Divisi wakaf sendiri di bentuk sejak tahun 2009 yang bersamaan dengan rancangan wakaf *online*. Namun wakaf *online* sendiri dijalankan sejak tahun

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk. Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa tanggal 04 Desember 2019, pukul 15.25 WIB.

2013 dengan kanal website resmi tabungwakaf.com. Di Medan, wakaf *online* resmi dimulai sejak tahun 2018 dengan website resmi donasikita.org.⁶⁸

2. Struktur organisasi

Sebagai salah satu Lembaga perwakafan resmi di Indonesia Dompot Dhuafa Medan mempunyai struktur organisasi kepengurusan, adapun struktur organisasi Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:



Sumber: Arsip Dompot Dhuafa kota Medan

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk. Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa tanggal 04 Desember 2019, pukul 15.25 WIB.

3. Program Dompét Dhuafa

Secara garis besar program wakaf pada Dompét Dhuafa kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Program kesehatan, didalam program kesehatan Dompét Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik.
- b. Program Pendidikan, didalam program pendidikan Dompét Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pembangunan sekolah dan universitas, serta beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu.
- c. Program ekonomi, untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompét Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru.
- d. Program pengembangan sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompét Dhuafa bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah, pembangunan mesjid dan lain sebagainya.⁶⁹

⁶⁹ Diambil dari: <https://www.dompstdhuafa.org/id/tentangkami> tanggal 19 Juli 2020, pukul 22.30 WIB.

Salah satu hasil dari program wakaf pendidikan Dompot Dhuafa adalah sekolah Bintang Rabbani yang terletak di Jalan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan yang masih berdiri hingga saat ini dan di program ekonomi diantaranya adalah Kampung Ternak Mandiri yang terletak di Binjai dan Langkat, kemudian Kampung Hortikultura Berdaya yang terletak di Desa Aji Julu Kabupaten Karo.⁷⁰

4. Teknik Pengumpulan Wakaf.

Dalam menjalankan wakaf *online* terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan wakaf diantaranya adalah:

a. Layanan langsung

Pada layanan langsung ini donatur dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ke kantor Dompot Dhuafa Cabang Medan.

b. Layanan *Online*

Layanan *online* ini bertujuan untuk mempermudah *wakif* yang berlokasi jauh ataupun tidak mempunyai waktu untuk melakukan wakaf di kantor

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Halimah Tusa'diyah selaku Manager Program Dompot Dhuafa Kota Medan tanggal 14 Juli 2020, pukul 14.35 WIB.

Dompot Dhuafa, para pe*wakif* dapat dengan mudah melakukan wakaf dengan cara yang sudah disediakan Dompot Dhuafa diantaranya:

a. Melalui kanal website :

- *tabungwakaf.org*. merupakan kanal wakaf yang berisi tentang himpunan seluruh wakaf di Indonesia.
- *donasikita.org*, merupakan kanal wakaf yang berisi himpunan zakat, sedekah, dan wakaf khusus di kota Medan.

b. Melalui aplikasi :

- Mumu
- Kitabisa

Kanal aplikasi ini merupakan *platform* kerja sama antara Dompot Dhuafa dengan pihak ketiga. Yang dapat diakses melalui *smartphone*.

c. Melalui Iklan Media cetak

- Harian Waspada, merupakan kerja sama Dompot Dhuafa dengan kanal berita lokal.

F. Latar Belakang Wakaf *Online* Pada Dompot Dhuafa

Setiap sesuatu pasti ada hal yang melatarbelakangi terjadinya, termasuk diantaranya realisasi wakaf *online* pada lembaga Dompot Dhuafa. Seiring

berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi telah merubah pola hidup serta pola pikir manusia. Banyak ide – ide baru muncul dikalangan masyarakat modern salah satunya yaitu wakaf *online*.

Berangkat dari persoalan kemaslahatan umat Dompot Dhuafa memiliki misi untuk mengajak masyarakat kaum muda atau yang sering disebut sebagai kaum *milenial* dan menyadarkan masyarakat bahwa untuk berwakaf tidak harus mempunyai harta yang banyak bahkan masyarakat dapat melakukan wakaf dimanapun dan kapanpun hanya melewati telepon genggam (*smartphone*) hal ini merupakan jawaban bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk melakukan wakaf. Gerakan wakaf Rp.10.000 merupakan jargon yang di kampanyekan oleh Dompot Dhuafa kepada masyarakat untuk melakukan wakaf *online*.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bpk. Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa 14 Juli 2020, pukul 14.35 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM WAKAF ONLINE PADA LEMBAGA DOMPET DHUAFA DITINJAU DARI PRESPEKTIF WAHBAH AZ – ZUHAILI

A. Konsep Wakaf *Online* pada Lembaga Dompot Dhuafa

Fiqih wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat, yang mana *ta'rif* ini berasal dari petunjuk Nabi, sedangkan cara penggunaan dan pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan kemashlahatan sesuai dengan kehendak pewakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.

Sistem pengumpulan wakaf yang diterapkan oleh Lembaga Dompot Dhuafa adalah sistem *online*, yakni dengan memanfaatkan teknologi jaringan perangkat yang terhubung dengan koneksi internet. Untuk melakukan wakaf para *pewakif* dapat menuju kepada *website* resmi Dompot Dhuafa. Di dalam *website* tersebut para *pewakif* dapat memilih program wakaf yang telah disediakan oleh pihak Dompot Dhuafa.

Setelah memilih program wakaf, para *pewakif* kemudian dapat melakukan wakaf dimulai dengan Rp.10.000 sampai tak terhingga, hal ini sesuai dengan keinginan nominal para *pewakif* yang ingin berwakaf di Lembaga Dompot Dhuafa tanpa harus bertemunya para pihak yang kemudian melakukan transaksinya melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Khusus *pewakif* yang melakukan wakaf diatas Rp 1.000.000 pada Dompot Dhuafa akan diberikan sertifikat wakaf oleh pihak Dompot Dhuafa.⁷²

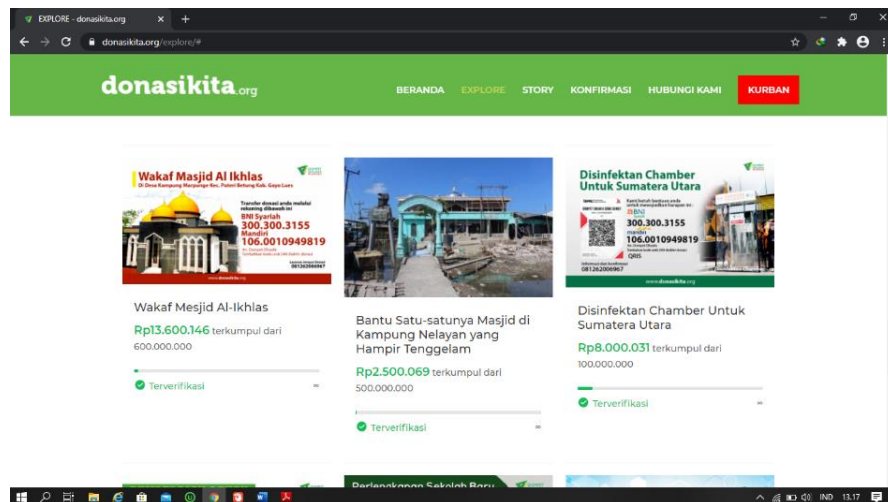
B. Mekanisme dalam melakukan wakaf *online*

Sesuai dengan penjelasan konsep berwakaf *online* pada Dompot Dhuafa Kota Medan maka diperlukan mekanisme dalam melakukan wakaf *online*. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyaluran aliran harta wakaf dan agar wakaf terstruktur. Mekanisme wakaf *online* diantaranya adalah :

1. Pemilihan Program Wakaf

Dalam melakukan wakaf *online* terdapat beberapa tahapan dalam menjalankan wakafnya. Pemilihan program wakaf adalah tahapan awalnya.

⁷²Wawancara dengan Bpk. Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa tanggal 04 Desember 2019, pukul 15.25 WIB.



Sumber: *donasikita.org*

Pemilihan program wakaf ini dimaksudkan untuk menentukan jenis peruntukkan wakaf yang dikehendaki *wakif* agar dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pihak Dompot Dhuafa memberi beberapa pilihan program seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya.

Menurut para ulama tujuan wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf ahli disebut juga wakaf 'alal aulad yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Dan wakaf khairi adalah wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum) wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan orang-orang tertentu⁷³

⁷³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Tangerang: Ciputat Press, 2005), h. 25

2. Mengisi Formulir

The image shows a mobile application interface for 'donasikita.org'. The screen is titled 'Pembayaran' (Payment). It contains two main sections: 'Data Pemesan' (Order Data) and 'Pilih Metode Pembayaran' (Choose Payment Method). The 'Data Pemesan' section has three text input fields labeled 'Masukan Nama', 'Masukan No WhatsApp', and 'Masukan Email (opsional)'. The 'Pilih Metode Pembayaran' section has two radio button options, one for 'BCA' and one for 'BNI Syariah'.

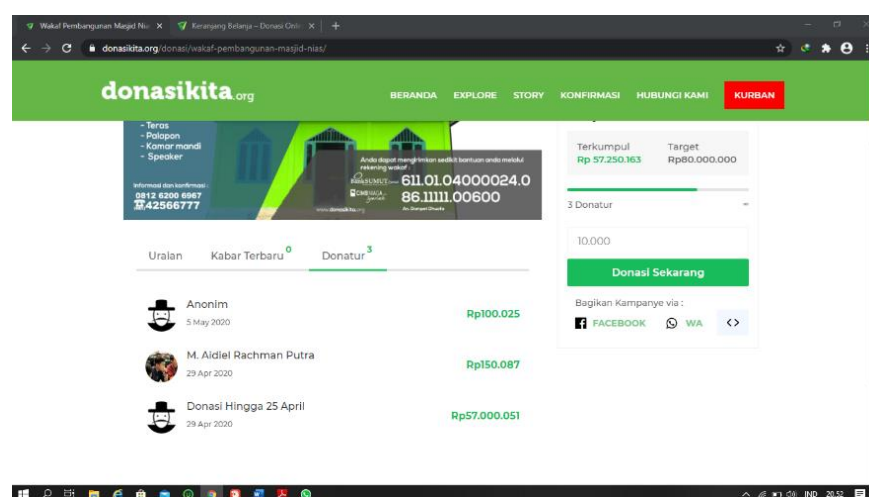
Sumber: *donasikita.org*

Seorang *wakif* harus mengisi formulir sebagai salah-satu ketentuan dari *wakaf online*. Pengisian formulir wakaf ditujukan kepada *wakif* sebagai identitas *wakif* setelah itu *wakif* memilih rekening sebagai sarana untuk mengirim uang, pengiriman uang yang dikirim sesuai dengan program yang dipilih dan jumlah yang sudah ditentukan pengiriman uang wakaf, melalui kolom-kolom yang sudah disediakan oleh Dompot Dhuafa.

3. Memilih Rekening Bank

Setelah mengisi formulir *wakif* dapat memilih rekening bank sebagai sarana pengiriman wakaf uang yang mana rekening bank tersebut telah ditetapkan atas nama lembaga (nazhir) wakaf sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

4. Tanda Penerima Wakaf



Sumber: *donasikita.org*

Setelah pengisian formulir tanda kesediaan wakaf uang dan telah mentransfer wakaf uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan, *wakif* menerima tanda penerimaan wakaf tunai dengan melihat nama pengirim wakaf pada daftar nama wakaf pada lembar website untuk *wakif* yang berwakaf diatas Rp.1.000.000 akan diberi sertifikat wakaf oleh pihak Dompot Dhuafa.

5. Konfirmasi ulang

Wakif yang sudah melakukan proses pewakafan dapat melakukan konfirmasi ulang yang bertujuan untuk memastikan harta dan peuntukan harta wakaf. Hal ini dapat dilakukan pada kolom konfirmasi *website* yang kemudian dialihkan melalui media sosial *whatsapp* atau telepon.

C. Undang – undang No.41 tahun 2004 terhadap wakaf *online*

Hukum tentang wakaf tidak ada secara jelas di dalam Al Quran namun hanya secara implisit, tetapi terdapat hadis yang menganjurkan untuk melakukan wakaf. Sejauh ini peraturan undang-undang perwakafan di Indonesia adalah undang-undang no.41 tahun 2004 yang beberapa isinya akan penulis paparkan sesuai dengan tema yang penulis angkat. Wakaf sesuai dengan Undang-undang no.41 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

A. Wakif

Undang-undang wakaf pasal 7, *wakif* meliputi:

- a. perseorangan, b. organisasi, c. badan hukum.

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila mengetahui persyaratan:

- a. dewasa, b. berakal sehat, c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
- d. pemilik sah serta harta benda wakaf.

Dalam hal ini *wakif* pada wakaf *online* merupakan *wakif* perorangan dimana *wakif* mewakafkan harta secara sempurna tanpa perantara, *wakif* sendiri yang mewakafkan hartanya kepada nadhir dan secara undang-undang *wakif* harus sudah memenuhi persyaratan *wakif* perseorangan.

B. Harta

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini di dalam prakteknya wakaf *online* menggunakan harta bergerak berupa uang yang dalam proses penyerahan hartanya dilakukan

secara tidak sempurna maksudnya adalah harta yang diberikan tidak dalam bentuk fisik langsung dan tidak dilakukan pendataan mendalam dan rawan akan manipulasi hal ini di sebabkan pendataan harta hanya sebatas formulir wakaf yang di isi secara *online* dikarenakan tidak bertemunya kedua belah pihak.

C. Nazhir

Pasal 9 Nazhir meliputi:

a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam hal ini Dompet Dhuafa sudah mendapatkan izin oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan penulis sebelumnya.

D. Ikrar wakaf

Ikrar Wakaf dalam Pasal 17 berisi tentang:

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2)Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal *Wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *Wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Dalam hal ini tidak terdapat ikrar wakaf dalam wakaf *online* dikarenakan tidak bertemunya kedua belah pihak dan tidak terdapat saksi oleh pihak yang berwenang yaitu PPAIW dalam ikrar wakaf *online*. Dan di dalam prakteknya terdapat pengkhususan bagi *pewakif* yang ingin mendapatkan akta ikrar wakaf maka diwajibkan untuk berwakaf minimal Rp 1.000.000 di lembaga Dompot Dhuafa.⁷⁴

⁷⁴ Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

D. Hukum Wakaf *Online* Ditinjau dari Perspektif Wahbah Az – Zuhaili

Sebelum penulis menjelaskan pemikiran Wahbah Az- Zuhaili mengenai wakaf maka terlebih dahulu penulis menjelaskan biografi tentang wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syria. Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1351 H/1932 M di Dir Athlah Damaskus (Suriah). Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili. Ayahnya bernama Syeh Mustafa Al-Zuhaili, seorang ulama terkemuka yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah. Sedang ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syari'at agama dan beliau hidup sebagai petani.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke 20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Muhammad Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur. Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat syria baik itu

dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu"annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proporsional.⁷⁵

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keIslaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau belajar di sekolah dasar (ibtidaiyah) di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946 memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus, hingga meraih sarjana pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas Al Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai doktor dengan disertasinya yang berjudul *asaru al-ḥarbu fī al-Fiqh al-Islāmī dirūsatu muqāranah*.

⁷⁵ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syeikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu di bidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (Tahun 1958M) menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan Syaikh Muhammad al-Rankusi. Kemudian ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardani (Tahun 1957 M) dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Hasan al-Shati (Tahun 1962 M).

Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu *Uşul al-Fiqh* dan *Muṣṭalah al-Hadīṣ* berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (Tahun 1990 M). Sementara, di bidang ilmu baca Al-Qur'an seperti Tajwid beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Sanaq dan ilmu Tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwajawati, dan dalam bidang bahasa Arab seperti *nahwu* dan *sharaf* beliau berguru dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab.⁷⁶

Kecerdasan Wahbah az - Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik

⁷⁶ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), h. 136

pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampainnya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. Al-Wasīṭ fī al-maḏhabī Ushul Fiqih al-Islami
2. *Al-Fiqh al-Islāmī fī uslūbu al-jadīd*
3. *Naẓriyāt al-Ḍarūrat al-Syarʿiyyah*
4. *Naẓriyāt al-Ḍamān*
5. *aṣaru al-ḥarbu fī al-Fiqh al-Islāmī dirāsatu muqāranah*
6. *Al-uṣūlu al-ʿāmmah liwahdah al-Dīnu al-ḥaq*
7. *Al-ʿalāqātu al-Dauliyah fī al-Islāmī*
8. *Uṣūlu al-Fiqh al-Islāmī*
9. *Juhūdu taqnīnu al-Fiqh al-Islāmī*
10. *Al-Fiqh al-Islāmī wa aḍillatuhu*.⁷⁷

⁷⁷ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qurʿan*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), h. 138

Dari 10 yang disebutkan di atas adalah termasuk karya Wahbah az-Zuhaili.

Disisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisanm - tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi 500 makalah.

Wakaf dalam paradigma yang baru lebih mengedepankan unsur produktifnya dan sebagai sumber ekonomi umat dari wakaf yang hanya kebutuhan ibadah dan penyediaan sarana ibadah murni (*ibadah mahdah*).⁷⁸ Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu* wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah adalah sunnah yang dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.s Ali Imran: 92)

⁷⁸ <https://www.bwi.go.id/455/2010/06/02/reaktualisasi-ajaran-wakaf/>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.s Al baqarah: 267)

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian tentang infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Lebih lanjut untuk memahami wakaf diperlukan hadis sebagai penjelas atas suatu hukumnya. Salah satu hadis tentang wakaf adalah:

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قل: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من

صدقة جارية، أو ولد صالح يد عوله. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.” (HR. Muslim)⁷⁹

⁷⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth), h. 1255

Wakaf termasuk karakteristik islam. Imam An-Nawawi berkata. “Wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam.” Imam Syafi’i berkata.” Orang-orang jahiliyah sebagaimana yang saya ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah.”

Menurut Wahbah dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, melakukan wakaf adalah keharusan untuk memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan wakafnya hal ini sebagaimana kesepakatan para ulama yaitu:

وقال الجمهور: للوقف أربعة: هي الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. باعتبار أن

الركن: ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءاً منه أم لا.

Artinya: “Mayoritas ulama mengatakan bahwa: wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shigat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.”⁸⁰

⁸⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 275

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terkait *shighat*, wakaf bisa terjadi sebagaimana dalam pembahasan rukun-rukun wakaf dengan pengucapan saja (dari orang yang wakaf) meskipun orang tertentu menurut Hanafiyyah dan Hanabilah sebagaimana jika itu untuk orang tidak tertentu menurut kesepakatan ulama, dengan *ijab* (pengucapan) dan *qabul* (penerimaan) menurut Malikiyyah dan Syafiiyyah dan sebagian Hanabilah jika wakaf untuk orang tidak tertentu.⁸¹

Selanjutnya adapun *shighat qabul* (*shighat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan hanafiyyah, sebagai mana yang di fatwakan. Juga, menurut kalangan Hanabilah sebagaimana yang dituturkan oleh al Qadhi Abu Ya'la. *Shighat qabul* juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, Dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf.

Oleh karena itu sesuatu menjadi wakaf hanya dengan ucapan sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, dan warisan terhadap suatu barang. *Shigah qabul* menurut

⁸¹ *Ibid.*, h. 309

kalangan Malikiyyah, Syafiiyah dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak, kepatutan untuk menerima, kalau tidak maka disyaratkan walinya yang menerima, sebagaimana hibah dan wasiat.⁸²

Maka terkait pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas penulis menarik kesimpulan bahwa *shigat* adalah hal yang harus di penuhi dalam melakukan suatu kegiatan wakaf.

Selain rukun wakaf terdapat syarat wakaf yang harus dipenuhi untuk keabsahan wakaf sebagaimana Wahbah az- Zuhaili mengatakan dalam bukunya:

المبحث الأول- شروط الوقف:

يشترط في الوقف لصحة الوقف ونف ونفاذه ما يأتي:

١- أن يكون الوقف حرّاً مالكاً

٢- أن يكون عاقلاً

٣- أن يكون بالغاً

٤- أن يكون رشيداً⁸³

⁸² *Ibid.*, h. 276

⁸³ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 176

Artinya: Demi keabsahan wakaf dan keberlangsungannya. Disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaklah Pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut.
2. Hendaklah si pewakaf orang yang berakal.
3. Hendaklah si pewakaf orang yang baligh.
4. Hendaklah si pewakaf orang dewasa.

Selain daripada itu di dalam bukunya Wahbah az- Zuhaili menyatakan mengenai pengakuan terjadinya wakaf disyaratkan adanya penjelasan wakaf tersebut meskipun sudah terjadi lama. Tentang pembuktian adanya wakaf kesaksian atas kesaksian bisa diterima. Demikian juga, kesaksian perempuan bersama laki-laki, kesaksian dengan publikasi dan pengumuman. Seperti saksi mengatakan, “aku menyaksikan dan mendengarkan...” kesaksian dengan bentuk mendengarkan bisa diterima dengan menjelaskan pihak yang menerima, seperti ucapan orang-orang untuk mesjid ini, juga untuk menjelaskan pihak-pihak yang menerima wakaf.⁸⁴

⁸⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 319

Berdasarkan perspektif Wahbah az – Zuhaili di atas bahwa untuk keabsahan suatu kegiatan wakaf maka rukun dan syarat wakaf adalah keharusan untuk dipenuhi. Sehingga hukum wakaf *online* di lembaga Dompot Dhuafa menurut penulis, terdapat rukun dan syarat wakaf yang tidak terpenuhi sehingga wakaf *online* di Lembaga Dompot Dhuafa tidak dapat di kategorikan sebagai wakaf melainkan hanya berbentuk sedekah dan infaq.

E. Analisa Penulis

Dari penjelasan diatas maka penulis ingin melakukan analisis terkait permasalahan yang penulis angkat di dalam penulisan skripsi ini. Terdapat beberapa poin yang dapat penulis paparkan dalam penjelasan tersebut yang dapat ditarik menjadi beberapa kesimpulan yaitu:

1. Para pihak yang melakukan wakaf haruslah melakukan *shigat* (pernyataan wakaf). Didalam wakaf *online* tidak terdapatnya *shigat* dikarenakan tidak bertemunya antara pihak *wakif* dan pengumpul wakaf. Hal ini selaras dengan perspektif Wahbah az-Zuhaili dan Undang-undang no.41 tahun 2004 Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.
2. Terkait syarat wakaf pihak pengumpul wakaf tidak dapat mengetahui kejelasan harta wakaf secara mendalam dan tidak dapat mengetahui

apakah *pewakif* adalah pemilik harta tersebut, apakah *pewakif* sudah cakap hukum atau belum, dan apakah *pewakif* merupakan orang yang tidak dalam jeratan hukum. dikarenakan tidak bertemunya kedua belah pihak dan di dalam pengisian data wakafnya rawan akan manipulasi data dikarenakan konfirmasi ulang hanya melalui media sosial.

3. Tidak terdapatnya saksi yang menjadi dasar dalam melakukan wakaf. Saksi wakaf merupakan salah satu hal yang disyaratkan untuk terjadinya wakaf. Hal ini selaras dengan perspektif Wahbah az-Zuhaili dan UU no. 41 tahun 2004 Pasal 17 ayat 1 dan 2.

Maka berdasarkan analisa penulis yang bersumber dari UU 41 tahun 2004 dan perspektif Wahbah az – Zuhaili bahwa pokok persoalan dalam melakukan wakaf *online* adalah di dalam prakteknya terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, baik secara hukum positif yaitu UU no.41 tahun 2004 maupun secara syara' seperti halnya perspektif Wahbah az-Zuhaili di atas yang merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan wakaf. Penulis juga setuju bahwa di dalam melakukan wakaf rukun dan syaratnya harus terpenuhi demi keabsahan suatu kegiatan wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf Dompot Dhuafa sebagai wakaf *online* tidak jauh berbeda dan memiliki tujuan yang sama dengan wakaf tradisional, tetapi dalam pelaksanaannya wakaf pada lembaga Dompot Dhuafa menggunakan sistem berbasis *online*. Mulai dari *shigah* (ikrar wakaf) yang dilakukan *wakif* sampai penyerahan harta/benda wakaf, tidak terjadi dalam satu majlis antara *wakif* dan nazhir. *Wakif* cukup dengan mengisi formulir yang sudah disediakan lembaga wakaf *online*, kemudian memilih program yang sudah disediakan karena wakaf online memiliki banyak program berbeda dengan wakaf tradisional dimana *wakif* dan nadhir bertemu dalam satu majelis untuk menyepakati benda/barang yang telah diwakafkan. Setelah terjadi kesepakatan dan jelas wujudnya harta/benda yang diwakafkan, dan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi,

wakaf bisa diterima oleh nadhir sepenuhnya, karena nadhir sebagai pengelola harta/benda wakaf.

2. Terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yang apabila di tarik dari prespektif Wahbah az-Zuhaili maka praktek wakaf *online* adalah tidak sah, karena syarat dan rukunnya belum dipenuhi secara sempurna. Wakaf *online* boleh-boleh saja, asalkan syarat dan rukunnya dapat terpenuhi, tetapi disini masih banyak syarat wakaf yang belum bisa dipenuhi secara sempurna, sebagaimana mestinya aturan wakaf. Terdapat beberapa rukun dan syarat didalam wakaf *online* yang tidak terpenuhi antara lain:

- a. *Shigah* / ikrar wakaf, dalam pelaksanaan wakaf *online* ikrar yang digunakan bisa dikatakan secara tidak langsung, dimana *wakif* dengan mengisi formulir, yang tidak kalah penting dalam wakaf adanya dua orang saksi, tetapi dalam pelaksanaan wakaf *online* tidak adanya saksi sama sekali.
- b. Harta, dalam pelaksanaan wakaf *online* harta yang akan diwakafkan tidak ada pendataan secara mendalam yang rawan akan manipulasi data dan hanya bersifat konfirmasi melalui media sosial hal ini

merupakan salah satu penyebab batalnya wakaf dikarenakan ketidakjelasan harta wakaf.

- c. Nazhir, yang tak kalah penting wakaf adalah nazhir, dimana seorang *nazhir* mengelola harta yang sudah diwakafkan dan *wakif* mengetahui sendiri potensi-potensi yang dimiliki nazhir dalam pengelolaan harta. *Wakif* dan nazhir dalam melakukan wakaf tidak ada dalam satu majelis untuk melakukan wakaf dan tidak disaksikan 2 orang saksi. Hal-hal ini yang bisa menjadikan wakaf *online* tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat secara sempurna.
- d. *Pewakif*, dikarenakan tidak bertemunya kedua belah pihak maka terdapat beberapa ketidakjelasan terhadap riwayat diri *pewakif* yang akan melakukan wakaf. Hal ini merupakan salah satu penyebab batalnya wakaf sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kejelasan *pewakif* adalah faktor keabsahan wakaf.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai masukan, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Apabila seseorang ingin melakukan wakaf harus mengerti dan paham bagaimana syarat dan rukunnya wakaf, agar wakaf yang dilakukan sah menurut agama dan sah dimata negara, agar tidak menimbulkan perselisihan di suatu hari nanti antara *wakif* dan lembaga wakaf.
2. Bagi lembaga wakaf *online* agar meningkatkan lagi dalam hal pemenuhan syarat dan rukun wakaf yang belum dapat dipenuhi seutuhnya. Untuk pemanfaatan dan pengelolaan sudah bagus, bisa dikembangkan lagi agar program wakaf yang sudah dibuat bisa dinikmati berbagai kalangan dan setiap orang bisa melakukan wakaf.
3. Bagi pemerintah untuk dapat membuat regulasi khusus terkait wakaf *online* yang kemudian dilanjutkan dengan bimbingan dan pembinaan untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan wakaf *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *Raudah al-Talibin*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah

Ali As Shaabuni, Muhammad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut : Daar al Fikr

Ubaid, Abu. *al-amwal*, Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas Al – Azhar, 1991

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-hafizh. *“Bulughul Marom”*, terj. Drs. Moh. Macfuddin Aladip, Semarang ; Toha Putra, 2012

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Juz 8, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2007

Az- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10, Jakarta : Gema Insani, 2011

Atep Hendang Waluya, *Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer*, Jurnal, (Jakarta : Misykat Al Anwar, 2018

Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi 1971

Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi*

'Ala At-Tahrir, Kairo : Isa Al-halabi

Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, terj. Drs. Moh. Macfuddin

Aladip, Semarang ; Toha Putra, 2012

Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*,

(Semarang :Pustaka Pelajar, 2004), h. 323

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V

Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press,

2005

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta:

Rajawali Pers, 2005

Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Lautan

Lestari & Islamic Book Service, 2010

Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat

Pemberdayaan Wakaf, 2007

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf Dan Perturan Pemerintahan*

Tentang Pelaksanaannya, Jakarta: Dirjend Bimas Islam Depag, 2007

Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007

Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, Djambatan, Jakarta, 1992

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah

Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan wakaf, 2013

Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan wakaf, 2006

Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2013

Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*

Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publishing,

2015

Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur al-Mishri. *Lisan al-'Arab*. Jilid 11, Bulaq:

Al-Mishriyah, 1301 H

Muhammad Jawad Mughniyah, editor. Umar Shahab, *Fiqh Lima Mazhab*.

Jakarta: Basrie Press, 1994

M. Sudirman, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional*, Jurnal

ParePare: STAIN ParePare, 2010

Mukhlisin Mazarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap*

Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Moderen

Darussalam Gontor, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010

Muhammad Daud Al-i. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-

Press, 1988

Muhammad Al-Khathib, *al Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah)

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI

Press, 1988

- Nurul Hukmiah, dkk, *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana: Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)*, Aceh: UNSYIAH, 2015
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress, 1986
- Syamsul Anwar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Belajar, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz 3*, Beirut: Darul Kutub
- Samiaji Sarosa, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT INDEKS, 2012
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Salim, Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2016
- Said Aqil Husain al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008
- Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

B. Website:

<https://donasi.tabungwakaf.com/campaign/>,

<https://ddwaspada.org/sejarah/>

<https://www.dompetdhuafa.org/id/tentangkami>

<https://www.bwi.go.id/455/2010/06/02/reaktualisasi-ajaran-wakaf/>

C. Wawancara:

Halimah Tusa'diyah selaku Manager Program Dompot Dhuafa Kota Medan
tanggal 14 Juli 2020, pukul 14.35 WIB.

Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Kota Medan tanggal 04
Desember 2019, pukul 15.25 WIB.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah Dompot Dhuafa Kota Medan dan sejarah perwakafan pada Dompot Dhuafa ?
2. Sejak kapan wakaf online dompet dhuafa beroperasi ?
3. Apa latar belakang Dompot Dhuafa membuat sistem pengumpulan wakaf secara *online* ?
4. Apa saja program wakaf dari dompet dhuafa ?
5. Bagaimana mekanisme dalam berwakaf online ?
6. Bagaimana regulasi dasar kebijakan wakaf online baik secara agama dan secara negara dalam wakaf *online* di Dompot Dhuafa ?
7. Apa jaminan bahwa harta di wakaf online tepat sasaran ?
8. Bagaimana tingkat antusias warga yang berwakaf online dengan yang berwakaf offline ?
9. Apa sasaran/bentuk dari wakaf online ?
10. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari berwakaf dengan cara online ?

B. Dokumentasi



Keterangan:

Wawancara dengan Pimpinan

Dompot Dhuafa Medan

Sulaiman,SHI



Keterangan:

Dompot Dhuafa Waspada Kota

Medan



Keterangan:

Sertifikat Nadzhir Wakaf

Dompot Dhuafa

C. Surat Keterangan Riset



SURAT KETERANGAN RISET No. 55/K/BD.01-DDW/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sulaiman, SHi**
Jabatan : Pimpinan Cabang Dompét Dhuafa Waspada

Menerangkan bahwa:

Nama : Tengku Muhammad Iqbal
NIM : 24153075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)

dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) berdasarkan surat pengantar dengan nomor : B.422/FSH.I/PP.009/7/2020, bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan riset di Dompét Dhuafa Waspada dengan judul "Hukum Wakaf Online dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi pada Lembaga Wakaf Dompét Dhuafa Kota Medan)."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sulaiman, SHi
Pimpinan Cabang



RIWAYAT HIDUP

Tengku Muhammad Iqbal Hafiz, lahir di Kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 1997. Putra dari pasangan Bapak Tengku Muhammad Yusuf, SP dan Ibu Ir. Nurhayati Siregar. Penulis adalah anak ke-2 dari 2 bersaudara, yang memiliki 1 saudara perempuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDS Pertiwi Kota Medan pada tahun 2009, tingkat SLTP/SMP di SMPS Al-Ulum Terpadu Kota Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA/SMA di SMAS Al-Ulum Terpadu Kota Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus Senat Mahasiswa yakni SEMA-UINSU komisi perundang-undangan. Salah satu kegiataanya adalah tentang evaluasi serta pembuatan aturan-aturan yang akan diterapkan di seluruh organisasi ekstra maupun intra di kampus UIN-SU Medan.